



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, format Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Demak belum sesuai dengan regulasi yang ada sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 14) diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 60 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KABUPATEN DEMAK

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Perangkat Daerah Pennanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatkan kerukunan antar/intra umat beragama	Kasus konflik antar umat beragama	Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama	Kasus konflik antar umat beragama	Indikator ini dipilih sebagai upaya untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui penguatan peran FKUB dalam kerukunan antar umat beragama	Menunjuk pada jumlah kasus konflik antar umat beragama	$\Sigma = \text{jumlah kasus konflik antar umat beragama}$	Kumulatif	Kantor Kesbangpol Linmas	Kantor Kesbangpol Linmas
2	Mewujudkan reformasi birokrasi	Skor PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	persentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana	Indikator ini dipilih untuk Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur melalui peningkatan jenjang pendidikan formal	Menunjuk pada jumlah ASN yang berpendidikan pasca sarjana dibagi jumlah seluruh ASN dikali seratus persen	$\Sigma = (\text{jumlah ASN yang berpendidikan pasca sarjana}) / (\text{jumlah seluruh ASN}) \times 100\%$	Kumulatif	BKPP	BKPP
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Meningkatnya nilai LKJIP	indikator ini dipilih untuk Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur melalui peningkatan nilai LKJIP	Menunjuk pada nilai dari Menpan RB atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	$\Sigma = \text{penilaian dari menpan atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah}$	Kumulatif	Bappeda litbang, Inspektorat, Bagian Orpeg Setda, BPKPAD	Bappeda litbang, Inspektorat, Bagian Orpeg Setda, BPKPAD
			Meningkatnya nilai laporan keuangan daerah	Nilai opini BPK	indikator ini dipilih untuk Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur melalui nilai opini BPK atas Laporan Keuangan	Menunjuk pada opini BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dan aset daerah	$\Sigma = \text{nilai opini BPK atas laporan keuangan tahun } (n-1)$	Kumulatif	BPKPAD, Bappeda Litbang, Inspektorat	BPKPAD, Bappeda Litbang, Inspektorat
			Terwujudnya Smart City	Jumlah sistem informasi pelayanan publik berbasis IT	Indikator ini dipilih sebagai upaya untuk Mempercepat perwujudan Smart City melalui pembuatan sistem informasi pada pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, penanaman modal, kependudukan catatan sipil, pengelolaan SDA dan Perumahan serta penanggulangan kemiskinan), Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penerapan <i>Smart city</i>	Menunjuk pada Perangkat Daerah yang menggunakan sistem informasi pelayanan publik berbasis IT	$\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis IT}$	Kumulatif	Diskominfo	Diskominfo
3	Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan menuju kedaulatan pangan	Nilai Tukar Petani	Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Produksi pertanian tanaman pangan utama padi	indikator ini dipilih sebagai upaya untuk meningkatkan produksi tanaman padi dari tahun sebelumnya	menunjuk pada jumlah produksi pertanian tanaman padi (ton) yang dihasilkan selama 1 tahun	$\Sigma = \text{jumlah produksi tanaman padi (ton) dalam 1 tahun}$	Kumulatif	Dinprtan Pangan	Dinprtan Pangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Perangkat Daerah Pennaggung Jawab	Sumber Data
				Produksi pertanian tanaman pangan utama jagung	indikator ini dipilih sebagai upaya untuk meningkatkan produksi tanaman jagung dari tahun sebelumnya	menunjuk pada jumlah produksi pertanian tanaman jagung (ton) yang dihasilkan selama 1 tahun	$\Sigma = \text{jumlah produksi tanaman jagung (ton) dalam 1 tahun}$	Kumulatif	Dinprtan Pangan	Dinprtan Pangan
				Produksi pertanian tanaman pangan utama kacang hijau	indikator ini dipilih sebagai upaya untuk meningkatkan produksi tanaman kacang hijau dari tahun sebelumnya	menunjuk pada jumlah produksi pertanian tanaman kacang hijau (ton) yang dihasilkan selama 1 tahun	$\Sigma = \text{jumlah produksi tanaman kacang hijau (ton) dalam 1 tahun}$	Kumulatif	Dinprtan Pangan	Dinprtan Pangan
			Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	Jumlah produksi perikanan tangkap	Indikator ini dipilih dalam rangka peningkatan produksi perikanan dan kelautan melalui pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Menunjukkan jumlah Produksi Perikanan Tangkap	$\Sigma = \text{jumlah produksi perikanan tangkap}$	Kumulatif	Dinas Kelautan & Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan
			Meningkatnya ketersediaan, distribusi, keanekaragaman dan keamanan pangan.	Ketersediaan pangan Utama	Indikator ini dipilih sebagai upaya peningkatan ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain	$\Sigma = \text{Konversi dari jumlah produksi padi (ton) GKJ ke beras (ton)}$	Kumulatif	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Meningkatkan kinerja perindustrian dan perdagangan serta kapasitas koperasi dan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	Pengembangan industri kecil menengah dan besar difokuskan pada pembinaan industri kecil menjadi industri menengah serta daya saing produk produk unggulan	Jumlah industri menunjukkan jumlah perusahaan industri kecil dan menengah	$\Sigma = \text{Jumlah industri kecil dan menengah/jumlah total industri} \times 100\%$	Kumulatif	Dinnakerind	Dinnakerind
			Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL	Persentase lokasi PKL yang ditata	Peningkatan daya saing sektor perdagangan difokuskan pada penataan pasar tradisional yang memenuhi persyaratan dan penataan PKL	Persentase lokasi PKL yang tertata merupakan perbandingan antara jumlah lokasi PKL yang telah tertata dengan jumlah seluruh lokasi PKL	$\Sigma = \text{Jumlah lokasi PKL yang tertata/jumlah lokasi PKL} \times 100\%$	Kumulatif	Dindagkop UMKM	Dindagkop UMKM
				Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	Peningkatan daya saing sektor perdagangan difokuskan pada penataan pasar tradisional yang memenuhi persyaratan	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan menunjukkan perbandingan antara pasar tradisional yang memenuhi syarat kesehatan, bersih dan nyaman dengan jumlah pasar tradisional.	$\Sigma = \text{Jumlah pasar tradisional yang sehat, bersih, nyaman/jumlah pasar tradisional} \times 100\%$	Kumulatif	Dindagkop UMKM	Dindagkop UMKM

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Perangkat Daerah Pennaggung Jawab	Sumber Data
				Nilai bersih ekspor perdagangan	peningkatan nilai ekspor bisa dilihat dari nilai bersih ekspor perdagangan	Ekspor Bersih Perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor.	$\Sigma = \text{nilai ekspor} - \text{nilai impor}$	Kumulatif	Dindagkop UMKM	Dindagkop UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	Peningkatan usaha mikro kecil difokuskan pada pertumbuhan usaha kecil, dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	Usaha Mikro dan Kecil adalah perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh UKM	$\Sigma = \text{Jumlah usaha mikro dan kecil} / \text{jumlah seluruh usaha} \times 100\%$	Kumulatif	Dindagkop UMKM	Dindagkop UMKM
				Persentase koperasi aktif	Peningkatan kualitas koperasi difokuskan pada pengembangan koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif	Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha	$\Sigma = \text{Jumlah pasar koperasi aktif} / \text{jumlah seluruh koperasi} \times 100\%$	Kumulatif	Dindagkop UMKM	Dindagkop UMKM
	Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	PDRB per Kapita	Menurunnya angka pengangguran	TPT (tingkat Pengangguran Terbuka)	Pengurangan pengangguran terbuka difokuskan pada peningkatan kapasitas calon tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja	Menunjukkan persentase angkatan kerja yang menganggur/mencari pekerjaan	$\Sigma = \text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja} / \text{Jumlah penduduk angkatan kerja} \times 100\%$	Kumulatif	Dinakerind	Dinakerind
	Meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan	Persentase pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD	Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata	Peningkatan daya saing sektor pariwisata difokuskan pada peningkatan kontribusi pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah	Menunjukkan Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata	$\Sigma = \text{jumlah pendapatan dari sektor pariwisata}$	Kumulatif	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya pelestarian keragaman dan Kekayaan budaya daerah	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Peningkatan daya saing sektor pariwisata difokuskan pada pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Menunjukkan pada perbandingan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dengan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada	$\Sigma = \text{jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan} / \text{jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada} \times 100\%$	Kumulatif	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
4	Meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar difokuskan pada perbaikan jalan kondisi buruk, pembangunan jaringan irigasi pada wilayah selatan Kabupaten Demak dan drainase	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan kota dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan.	$\Sigma = \text{panjang jalan kota dalam kondisi baik} / \text{panjang seluruh jalan kota yang ada} \times 100\%$	Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Perangkat Daerah Pennaggung Jawab	Sumber Data
			Meningkatnya kualitas drainase	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar difokuskan pada perbaikan jalan kondisi buruk, pembangunan jaringan irigasi pada wilayah selatan Kabupaten Demak dan drainase	Menunjukkan persentase panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\Sigma = \text{Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik} / \text{luas irigasi kabupaten} \times 100\%$	Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.	Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan	Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar difokuskan pada perbaikan jalan kondisi buruk, pembangunan jaringan irigasi pada wilayah selatan Kabupaten Demak dan drainase	Menunjukkan persentase luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$\Sigma = \text{Panjang drainase yang tidak tersumbat (km)} / \text{panjang saluran drainase} \times 100\%$	Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Terpenuhi sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman sehat di fokuskan pada penyediaan air bersih pada semua penduduk, penataan kawasan kumuh dan peningkatan akses sanitasi dasar.	Menunjuk pada semakin berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Demak	$\Sigma = \text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni}$	Kumulatif	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau	Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang difokuskan pada tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	menunjuk pada perbandingan tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) dengan RTR yang seharusnya	$\Sigma = \text{Jumlah RTR yang tersedia} / \text{jumlah RTR yang seharusnya} \times 100\%$	Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Perangkat Daerah Pennaggung Jawab	Sumber Data
			Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan	Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan ruang difokuskan pada tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana (RTR masing-masing kabupaten/kota).	$\Sigma = \text{Jumlah Akhir Tahun Pencapaian SPM Luasan RTH Publik yang tersedia} / \text{jumlah wilayah kota atau kawasan perkotaan luasan RTH yang seharusnya} \times 100 \%$	Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan pelayanan transportasi dan perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan yang tersedia (Jalan prov, kabupaten dan nasional)	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Peningkatan pelayanan perhubungan darat difokuskan pada penyediaan angkutan pada akses atau jaringan jalan dan penyediaan rambu rambu lalu lintas.	Menunjuk jumlah sarana perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik dibandingkan dengan sarana perlengkapan jalan yang ada	$\Sigma = \text{jumlah sarana perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik} / \text{sarana perlengkapan jalan yang ada} \times 100 \%$	Kumulatif	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
5	Meningkatkan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal.	Angka Harapan lama sekolah	Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prsarana pendidikan dan pengurangan penduduk usia sekolah yang tidak sekolah	Menunjuk pada perbandingan rentang Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan HLS minimal dengan HLS maksimal dengan HLS minimal	$\Sigma = \text{HLS} - \text{HLS minimal} / \text{HLS maksimal} - \text{HLS minimal} \times 100 \%$	Kumulatif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar, PAUD dan Dikdas	APK SMP/MTS	Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar, PAUD dan Dikdas	APK SMP/MTS adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP/MTS/Paket B dibagi dengan jumlah penduduk berusia 13 hingga 15 tahun	$\Sigma = (\text{jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP/MTS/Paket B}) / \text{jumlah penduduk berusia 13 hingga 15 tahun} \times 100 \%$	Kumulatif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Perangkat Daerah Pennaggung Jawab	Sumber Data
	Meningkatkan minat baca masyarakat	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	Peningkatan minat baca difokuskan pada peningkatan kunjungan pemustaka	Pertumbuhan Pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun, Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.	$\Sigma = \text{Jumlah Pengunjung Perpustakaan tahun ini} - \text{jumlah pengunjung perpustakaan tahun lalu} / \text{Jumlah Pengunjung Perpustakaan tahun lalu} \times 100\%$	Kumulatif	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	AKI (Angka Kematian Ibu)	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat difokuskan pada penurunan AKI, AKB, AKABA, gizi buruk, peningkatan kualitas FKTP, pembangunan Rumah Sakit Tipe D di daerah Karangawen dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	Angka Kematian Ibu atau AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100 000 kelahiran hidup.	$\Sigma = \text{Jumlah kematian ibu berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas pada tahun tertentu} / \text{Jumlah Kelahiran Hidup pada Tahun yang sama} \times 100\%$	Kumulatif	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				AKB (Angka Kematian Bayi)	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat difokuskan pada penurunan AKB	Angka Kematian Bayi atau AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.	$\Sigma = \text{Jumlah Bayi yang meninggal sebelum Usia 1 tahun} / \text{Jumlah Kelahiran Hidup pada Tahun yang sama} \times 1000$	Kumulatif	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat difokuskan pada pembangunan Rumah Sakit tipe D	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	$\Sigma = \text{jumlah Rumah Sakit per } 100.000 \text{ penduduk}$	Kumulatif	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Perangkat Daerah Pennaggung Jawab	Sumber Data
	Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial dan penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial	Penanganan PMKS difokuskan pada fakir miskin, penyandang disabilitas dan anak terlantar, Program keluarga harapan serta penguatan kelembagaan penanganan PMKS	Merujuk pada Peningkatan Penanganan PMKS serta PMKS yang mendapat perlindungan sosial	$\Sigma = \text{Jumlah PMKS yang mendapat perlindungan sosial} / \text{Jumlah seluruh PMKS} \times 100\%$	Kumulatif	Dinsosp2pa	Dinsosp2pa
6	Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Angka kriminalitas yang ditangani	Menurunnya angka kriminalitas	Angka kriminalitas yang ditangani	Peningkatan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peningkatan patroli pada daerah rawan.	Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah.	$\Sigma = \text{Jumlah tindak kriminal yang tertangani selama 1 Tahun} / \text{jumlah penduduk} \times 10.000$	Kumulatif	Satpol PP	Satpol PP
			Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	Presentase Penegakan Peraturan daerah	Peningkatan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peningkatan patroli pada daerah rawan.	Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah.	$\Sigma = \text{Jumlah peraturan daerah yang ditegakan} / \text{jumlah seluruh Peraturan Daerah} \times 100\%$	Kumulatif	Satpol PP	Satpol PP
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Peningkatan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat difokuskan pada pembentukan desa tangguh bencana pada desa yang rawan bencana.	merujuk pada jumlah yang desa rawan bencana yang dibentuk menjadi desa tangguh bencana	$\Sigma = \text{Jumlah Desa tangguh bencana yang terbentuk tiap tahunnya}$	Kumulatif	BPBD	BPBD
7	Mengembangkan potensi pemuda dalam olahraga dan pembangunan.	Prestasi pemuda di lingkup provinsi maupun nasional	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Jumlah medali olahraga yang diterima	indikator ini dipilih sebagai upaya Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga difokuskan pada jumlah medali olahraga yang diterima	Hasil Perolehan medali (Emas, Perak, Perunggu) dari atlet-atlet Kab. Demak dalam kejuaraan olahraga tingkat karesidenan, Propinsi, Nasional, Regional dan Internasional	$\Sigma = (\text{Emas} + \text{perak} + \text{perunggu})$	Kumulatif	Dinpora	Dinpora
				Presentase organisasi pramuka aktif	indikator ini dipilih sebagai upaya Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga difokuskan pada jumlah medali olahraga yang diterima	Menunjuk pada perbandingan jumlah organisasi Pramuka Aktif dengan Seluruh Organisasi Pramuka yang ada	$\Sigma = (\text{jumlah organisasi pramuka yang aktif}) / (\text{jumlah organisasi yang ada}) \times 100\%$	Kumulatif	Dinpora	Dinpora

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Perangkat Daerah Pennaggung Jawab	Sumber Data
		Tujuan								
	Mengembangkan potensi kesenian lokal	Jumlah kesenian lokal yang diwujudkan dalam event budaya	Meningkatnya pelestarian kesenian Lokal	Jumlah event kesenian	Peningkatan Pelestarian Kesenian Lokal dilakukan dengan Peningkatan Jumlah event Kesenian.	Menunjuk pada banyaknya event Kesenian Lokal yang diselenggarakan dalam 1 Tahun	$\Sigma = \text{Jumlah Event Kesenian dalam 1 tahun}$	Kumulatif	Dindikbud	Dindikbud
	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Pertumbuhan penduduk	Terkendalnya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian pertumbuhan penduduk difokuskan pengurangan unmetneed dan pengendalian jumlah anggota keluarga	Merujuk pada perbandingan jumlah anak dengan jumlah keluarga	$\Sigma = \text{jumlah ana/jumlah keluarga} \times 100\%$	Kumulatif	Dinpermasdes dalduk p2 kb	Dinpermasdes dalduk p2 kb
	Meningkatkan keberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak	IPG	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	Tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan difokuskan pada peningkatan peran lembaga desa/keurahan	Menunjukkan persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat	$\Sigma = \text{Jumlah Swadaya Masyarakat Yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat/Total Pemberdayaan Masyarakat} \times 100\%$	Kumulatif	Dinpermasdes dalduk p2 kb	Dinpermasdes dalduk p2 kb
		IDG	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak difokuskan pada menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Menunjuk pada jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan tertangani	$\Sigma = \text{jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan tertangani}$	Kumulatif	Dinsosp2pa	Dinsosp2pa
				Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak difokuskan pada penanganan kekerasan perempuan	Menunjuk pada jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan tertangani	$\Sigma = \text{jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan tertangani}$	Kumulatif	Dinsosp2pa	Dinsosp2pa
8	Meningkatkan nilai dan jumlah investasi serta kualitas pelayanan publik Kabupaten Pasuruan	Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN	Nilai Investasi PMA	Peningkatan investasi difokuskan pada peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan pada PTSP	Menunjuk pada jumlah nilai investasi Penanaman Modal Asing	$\Sigma = \text{jumlah nilai investasi Penanaman Modal Asing}$	Kumulatif	Din PM PTSP	Din PM PTSP
				Nilai Investasi PMDN		Menunjuk pada jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	$\Sigma = \text{jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri}$			
			Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah ijin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Peningkatan investasi difokuskan pada peningkatan jumlah ijin yang dilayani oleh PTSP	Menunjuk pada jumlah ijin yang dikeluarkan oleh PTSP dalam 1 tahun	$\Sigma = \text{Jumlah ijin yang dikeluarkan oleh PTSP dalam 1 tahun}$	Kumulatif	Din PM PTSP	Din PM PTSP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Perangkat Daerah Pennanggung Jawab	Sumber Data
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)	Peningkatan pelayanan public difokuskan pada peningkatan kepuasan masyarakat atas pemberian pelayanan di PD yang memberikan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin tingginya nilai IKM berbanding dengan tingginya nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten Demak.	$\Sigma = \text{Total dari nilai persepsi per unsure} / \text{total unsure yang terisi} \times \text{nilai penimbang}$	Kumulatif	Bagian Orpeg-Setda	Bagian Orpeg-Setda
9	Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup, udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan dan kegiatan industri	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	Penghargaan Kota Terbersih	Peningkatan kualitas sumberdaya lingkungan difokuskan pada pencegahan terjadinya pencemaran, penanaman mangrove di wilayah pesisir dan kebersihan kota perbaikan kualitas lingkungan	Menunjuk pada Penilaian Kementrian Lingkungan Hidup atas Kebersihan Kota dan kualitas lingkungan	$\Sigma = \text{Perolehan Adipura}$	Kumulatif	DLH	DLH

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR